

**PERAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT**

(Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Suchi Fitri Yani

NPM : 1651010116

Program Studi : Ekonomi Syari'ah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

PERAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT

(Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Suchi Fitri Yani

NPM : 1651010116

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

ABSTRAK

Peran Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat

(Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)

Oleh :

Suchi Fitri Yani

Zakat merupakan sebuah instrumen penghambaan seorang umat muslim kepada tuhan (Allah SWT) zakat juga merupakan instrumen pembangunan yang dapat mengoptimalkan kesejahteraan umat bagi *muzaki* ataupun *mustahiq*, yang berhubungan langsung dengan sektor ekonomi umat dan berdampak sosial bagi masyarakat. Zakat mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat memberikan keadilan bagi para *mustahiq*, sementara disisi yang lain *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah platform global yang dibentuk oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai tujuan untuk menurunkan kemiskinan dan semua turunan persoalan yang ada. Dan peran zakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (*mustahiq*) yakni untuk mencapai kesejahteraan umat, maka dari itu untuk mendistribusikan dana filantropi maka dibutuhkan lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional seperti yang telah terbentuk di bandar Lampung yaitu BAZNAS Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana filantropi tersebut.

Untuk mengetahui beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana peran zakat dalam mewujudkan SDGs? Dan bagaimana peran zakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (*mustahiq*)?. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran zakat sendiri dalam mewujudkan tujuan SDGs dan peran zakat dalam meningkatkan pendapatan para *mustahiq*.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam tercapainya tujuan SDGs dan meningkatkan pendapatan *mutahiq*, Kontribusi BAZNAS terhadap pencapaian tujuan SDGs yaitu dengan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang berkontribusi melalui 5 bidang program, pendistribusian tersebut yaitu pendistribusian dana zakat di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan dan bidang kesehatan. dan penghasilan para *mustahiq* mengalami peningkatan setelah diberikan bantuan dari bidang ekonomi dalam program bandar Lampung makmur dan berkeadilan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

PERAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)

Nama

SUCHI FITRI YANI

NPM

1651010116

Jurusan

Ekonomi Syariah

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP.198008012003121001


Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy
NIP.

Ketua Jurusan,


Madnasir, S.E., M.S.I

NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratminto Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“PERAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh: **SUCHI FITRI YANI, NPM. 1651010116,**

Jurusan: **Ekonomi Syariah**, telah dimunaqasahkan pada: Hari/Tanggal: **Rabu, 04 November 2020.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Budimansyah, M. Kom.I**

Sekretaris : **Mohammad Fikri Nugraha Kholid, M.Pd**

Penguji I : **Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

Penguji II : **Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

Penguji Pendamping I: **Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy**

Mengetahui,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ
فَهُوَ خَلْفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. As-Saba':39)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas pertolongan-Nya, kasih sayang-Nya dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

1. Kepada Orang Tua ku tercinta yakni Ayah Arlan dan Ibu tercinta Sumirah, yang selama ini selalu sabar menjaga dan merawatku sampai saat ini, memberiku semangat dan mencurahkan jiwa dan raganya hanya untuk segera melihat putrinya menyelesaikan perkuliahannya, yang jasanya tidak mungkin dapat aku balas sampai kapanpun, tiada kata-kata yang dapat terucap dari lisan putrimu ini atas segala pengorbanan dan do'a-do'a yang telah engkau panjatkan untukku. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara-saudara kandungku yang tersayang yakni kakakku Ardhi Alif Utama dan adikku Tri Ari Wahyuni, yang telah memberikan semangat dan selalu memotivasiku selama kuliah dalam menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Noor, Nyek Hj. Siti Fatimah, Kyai Ruslan Abdul Ghofur Noor, Nyai Ervina Ahsanti, Kak adi, Kang amir, Teh Dewi Risyantika, Mba Leha, Liha, Sri, Diana, Lina, Tanti, Laila Fudholah, Lailatul Munawaroh, Nurhayati, Halimah, Kesti, Wahyuningsih, Dwi dkk. Yang selalu saling mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat

bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Keluarga Besar Kelompok Kerja Nyata, KKN kelompok 92, Desa Banjar Sari, kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Erwin, Yusuf, Bayu, Dea, Meary, Puty, Nunung, Anggun, Laili, Meriza, Siska, Tiara yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga besar Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) IPNU IPPNU UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan banyak ilmu dan selalu memberikan saya semangat untuk lebih mencintai Allah dan Rasulullah beserta sesama umat muslim.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Suchi Fitri Yani dilahirkan di Bukit Kemuning Lampung Utara pada tanggal 26 Januari 1998. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Arlan dengan Ibu Sumirah. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN 02 Pulau Pangung Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2010.
 2. MTs Darul Huda Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2013.
 3. SMAN 01 Bukit Kemuning Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2016.
 4. Pada tahun 2016 juga penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2016 hingga sekarang belajar di Pondok Pesantren An-Noor, Pandawa, Sukarame Bandar Lampung.
- Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur yang tak terhingga kepada yang maha agung, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)”**

Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu Pengetahuan) dengan berakhlak yang mulia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. S. I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa selalu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa/i sekaligus selaku

Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.

2. Bapak Madnasir S. E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu bersabar dalam memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
3. Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebaik mungkin.
4. Bapak Ibu dosen, beserta para staff dan karyawan UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta pimpinan dan karyawan Perpustakaan Pusat maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
5. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan angkatan 2016 program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya kelas B, yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan, dari Kuliah Ta'aruf (Kulta) hingga proses skripsi ini, Terimakasih atas motivasi dan dukungan dari kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berkah dunia akhirat.

7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu terikat dalam Ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta keilmuan yang terkait dengan Ekonomi Islam.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan masalah	9
E. Batasan Masalah.....	10
F. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
H. Kerangka Berfikir	11
I. Tinjauan Pustaka.....	13
J. Metode Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Zakat.....	26
1. Definisi Zakat	26
2. Zakat dalam Al-Qur'an dan Hadis	29
3. Mustahiq Zakat.....	32
4. Syarat Wajib Zakat	41
5. Hikmah Zakat	42
6. Konsep Lembaga Zakat	42
7. Zakat Sebagai Sumber Pembentukan Dana	44
B. Konsep <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	49
1. Tinjauan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	49
2. Tujuan <i>SDGs</i>	53
3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs.....	54
C. Teori Pendapatan	61
1. Definisi Pendapatan.....	61
2. Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (<i>Household</i>).....	63
a. Pendapatan rumah tangga dalam konteks konvensional	63
b. Pendapatan rumah tangga dalam perspektif islam	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	70
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Bandar Lampung	70
2. Visi dan Misi	71
3. Tujuan Mutu	72
4. Kebijakan Mutu	72
5. Dasar Hukum.....	73
6. Struktur Organisasi.....	74

B. Pendayagunaan Dana ZIS	75
1. Bandar Lampung Peduli	75
2. Bandar Lampung Taqwa	76
3. Bandar Lampung Cerdas	76
4. Bandar Lampung Sehat	76
5. Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan	77
C. Sistem Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqoh	81
1. Perencanaan	85
2. Pengorganisasian	85
3. Pelaksanaan	86
4. Pengawasan	86
D. Pendistribusian Zakat	87
1. Bantuan Sesaat	87
2. Bantuan Pemberdayaan	87
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Peran Zakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).....	92
1. Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi.....	93
2. Hubungan Zakat dengan SDGs	95
3. Peran Zakat dalam Mewujudkan SDGs	99
B. Peran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Mustahiq).....	111
1. Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga pada Mustahiq Melalui Zakat Produktif Sebagai Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)	113

2. Analisis Pandangan Ekonomi Islam dalam Pendapatan Rumah

Tangga122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan127

B. Saran.....129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi Penghimpunan ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung 2017-2019.....	69
2. Rekapitulasi Penyaluran Infaq Dan SodaqohBaznas Kota Bandar Lampung 2017	73
3. Rekapitulasi Penyaluran Infaq Dan Sodaqoh Baznas Kota Bandar Lampung 2018	73
4. Rekapitulasi Penyaluran Infaq Dan Sodaqoh Baznas Kota Bandar Lampung 2019	74
5. 17 Tujuan SDGs dan penjelasan secara singkat.....	81
6. Rekapitulasi penyaluran ZIS dalam Bidang Sosial.....	86
7. Rekapitulasi penyaluran ZIS dalam Bidang Ekonomi	88
8. Rekapitulasi penyaluran ZIS dalam Bidang Agama	90
9. Rekapitulasi penyaluran ZIS dalam Bidang Pendidikan.....	91
10. Rekapitulasi penyaluran ZIS dalam Bidang Kesehatan	92
11. Daftar Penerima Bantuan Modal Dana Bergulir UMK.....	98
12. Pendapatan Mustahiq Rata-rata sebelum dan sesudah mendapatkan Bantuan Modal Zakat Produktif	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Peran Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris Pada Baznas Kota Bandar Lampung)**”.

Untuk memahami kesalahan maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini, antara lain:

1. **Peran** adalah perangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.¹

¹ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* Jakarta: Selemba Empat, 2012, h. 362.

2. **Zakat** adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²
3. **Sustainable Development Goals (SDGs)** atau disebut juga dengan pembangunan berkelanjutan adalah suatu visi konfrensif yang dikeluarkan oleh perserikatan bangsa-bangsa untuk mencapai dunia yang lebih baik pada saat mendatang.³
4. **Pendapatan** adalah selisih antara nilai produksi di kurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Dari pendapatan tersebut digunakan untuk modal usaha berikutnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁴
5. **Ekonomi** adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).⁵
6. **Masyarakat** merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok.⁶

² Sri Nurhayati dan Wasilah, *akuntansi syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hal.278

³ Inspirator Muda Nusantara, *Sustainable Development Goals*, (Bandung, 2017),hal.5.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001) hal. 204

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa(Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2008

⁶ Bambang Tejkusumo, *Geoedukasi Volume III, No.1*, (Maret: 2014), hal.38

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih judul skripsi ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut:

1. Secara Obyektif

Bagi penulis pentingnya penelitian ini dengan judul peran zakat dalam mewujudkan SDGs dimana peran zakat sendiri dapat dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat, tidak terelakkan dimana peran zakat sendiri memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam mewujudkan tujuan SDGs yaitu seperti, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

2. Secara Subjektif

Dalam penelitian ini penulis memilih peran zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dikarenakan;

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan ataupun dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- b. Judul yang diajukan oleh penulis sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni jurusan Ekonomi Syariah.
- c. Penelitian ini dirasakan mampu untuk diselesaikan oleh penulis, dikarenakan mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini baik itu data sekunder maupun data primer memiliki kemudahan akses serta letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang

Islam berpotensi memajukan ekonomi masyarakat karena ajaran islam memiliki konsep zakat sebagai kepedulian orang kaya kepada orang miskin pada hakikatnya dimaksudkan untuk memperkecil jurang kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin terlebih untuk mengangkat keterbebasan dari kemiskinan, dan mencegah mereka dari hidup kelaparan dan kesengsaraan.⁷

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan yang memiliki potensi sangat penting dan strategis dengan menentukan baik dari isi pembangunan kesejahteraan umat dan potensi ekonominya, sebagai aspek dalam mewujudkan keadilan sosial.

Zakat mempunyai fungsi pokok sosial ekonomi yang berarti zakat

⁷ Institut Agama Islam Negeri, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif* (IAIN:1990), hal.8

mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi.⁸

Zakat adalah bagian dari harta yang dimiliki dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk diserahkan kepada mustahiq, Asy Syaukani berkata zakat yaitu memberi suatu bagian harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya.⁹

Zakat mengandung dua fungsi ibadah, yaitu beribadah secara individual dan juga melaksanakan ibadah secara sosial sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membesihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.¹⁰ (QS. At-Taubah ayat 103)

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah agar dia mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mencampurkan amal shaleh dengan amal buruk, walaupun ayat itu diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad

⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal.77

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal.5

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media:2002), hal.203.

karena malas. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya.

Firman Allah Ta'ala, "Serta berdo'lah bagi mereka." Yakni do'akanlah mereka dan mintalah ampun bagi mereka. Dalam penafsiran ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata bahwa "Apabila Nabi saw. menerima sedekah dari suatu kaum, maka beliau mendoakan mereka. Ayahku pergi untuk menyampaikan sedekahnya, maka beliau berdoa, "ya Allah, semoga engkau melimpahkan rahmat kepada keluarga Abi Aufa." Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya doamu itu merupakan penyejuk hati bagi mereka." Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini yaitu, "Merupakan rahmat bagi mereka." Firman Allah Ta'ala, "Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." yakni, maha mendengar doa-doamu dan maha mengetahui siapa yang berhak mendapat doamu. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Hudzaifah, "Sesungguhnya doa Nabi saw. itu menjangkau seorang ayah, anak, dan cucunya."¹¹

Maka ayat diatas dapat menjelaskan bahwa makna bersih, dan suci dalam menunaikan zakat, memiliki makna yakni penyucian bagi hati dan jiwa pada kecendrungan egoisme dan cinta terhadap harta duniawi, sedangkan kata ambillah merupakan perintah untuk mengambil zakat yang dilakukan pemerintah, seorang muslim belum sempurna imannya apabila belum melaksanakan kewajiban zakat yang merupakan rukun islam yang

¹¹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 659-660

ketiga. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban.¹² Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat islam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada allah SWT. Islam menempatkan zakat sama pentingnya dengan shalat, islam menempatkan zakat bukan hanya sebagai ibadah wajib tetapi juga pilar utama dalam ekonomi.¹³

Pada perkembangan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas, Dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Kontribusi Zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus dalam pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

¹² Husyn Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progresif: 2004), hal.7.

¹³ Dedi Pranoto, *Sistem Ekonomi Keuangan Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Laziswaf kota Cirebon*, (Skripsi Kementerian Agama RI IAIN Syekh Nurjati: 2011), hal. 5.

dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁴

Umumnya antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di Indonesia ini. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu persatu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada tujuan yakni: 1. Menghapus Kemiskinan, 2. Mengakhiri kelaparan, 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4. Pendidikan bermutu. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa disetiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, dll.¹⁵

Pentingnya peran lembaga zakat dalam melakukan penyaluran dana zakat, dimana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Peranan lembaga amil zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran, tidak menggunakan sistem riba dalam pemberian bantuan modal, mencegah terjadinya penyerahan zakat secara terang-terangan dan bersifat individual, karena akan mengakibatkan terjadinya penyaluran zakat yang tidak merata. Alasan mengapa

¹⁴ Baznas, *Buku Statistik Zakat Nasional*, (diterbitkan oleh Bagian SIM & Pelaporan: 2016), hal. 20.

¹⁵ *Ibid.* hal 30.

penyaluran dana zakat yang baik serta merata itu begitu penting, dikarenakan demi mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat (*Muzakki*) akan lembaga amil zakat dalam mengelola dana umat.

Salah satu lembaga amil zakat yang telah berkembang dikota Bandar Lampung adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga amil zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu permodalan dan memiliki tujuan yaitu dapat menjadi partner pemerintah dalam program SDGs (*Sustainable Development Goals*) salah satunya adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Disamping itu juga perlu dikaji lebih dalam khususnya bagaimana studi dapat memotret hubungan keduanya, serta menilai tujuan prioritas zakat bagi ketercapaiannya SDGs (*Sustainable Development Goals*) secara langsung dalam implementasinya. Dengan demikian, zakat dapat secara pasti menilai kinerjanya dan menyakinkan bahwa ia dapat berperan bagi ketercapaian kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemaparan singkat diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian lebih dalam tentang “Peran Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana peran zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat?

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka perlu adanya pembatasan masalah, yang berkaitan dengan peran zakat dalam mewujudkan tujuan SDGs serta peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *mustahiq*, dan hanya terfokus pada program BAZNAS yakni Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Secara teoritis

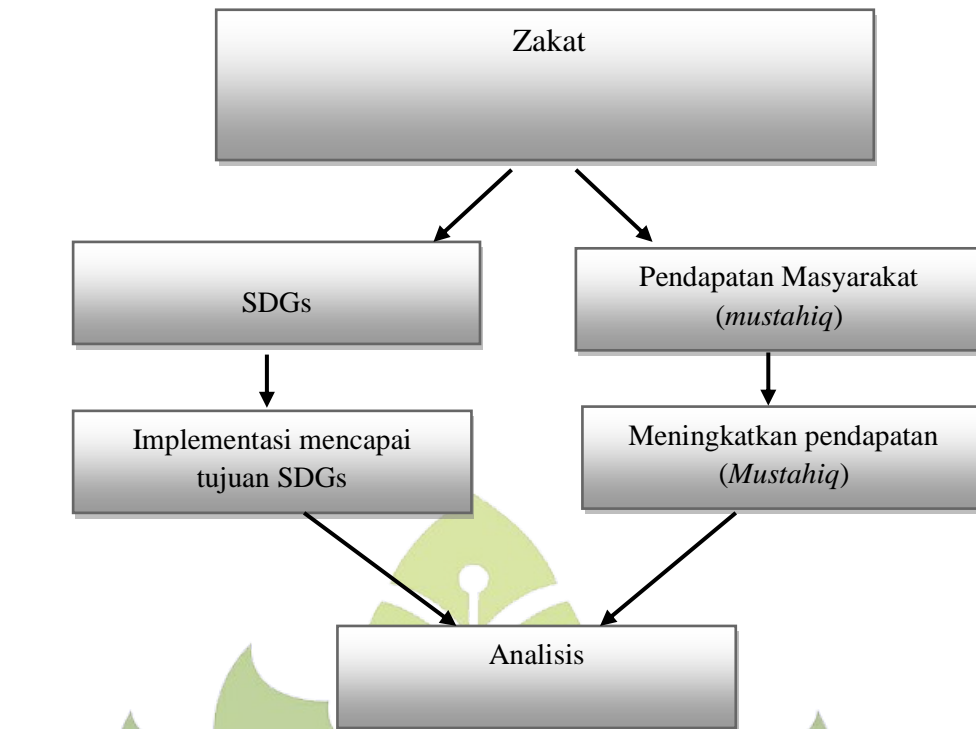
Secara teoritis manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi yang menjadi sumbangan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam memajukan pengelolaan BAZNAS. Dan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi islam khususnya yang berkaitan dengan peran zakat dalam mewujudkan SDGs untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada dilembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota Bandar Lampung.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam disetiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dapat mnjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam.

H. Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaiman teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.



Zakat merupakan kewajiban umat untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Swt, sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pandangan ekonomi, zakat mempunyai kesepadanan dengan variabel-variabel ekonomi yang mencakup pajak, retribusi, konsumsi, produksi, tabungan, dan investasi. Zakat sering dianggap sebagai sumber daya sekaligus sumber dana potensial didalam pelaksanaan program-programnya dengan harapan dapat memberi dampak dan perubahan positif bagi mereka yang menerimanya khususnya dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

Dalam pendistribusian dana alokasi zakat, infaq, sedekah nasional didistribusikan kepada bidang-bidang seperti sosial kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan yang merupakan bagian dari

17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Zakat berupaya agar dapat mencapai tujuannya yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para mustahiq atau orang-orang yang berhak atas zakat, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya melalui program-program BAZNAS yang berfokus kepada masalah zakat produktif, adapun sasaran utama program zakat produktif adalah pemberian bantuan modal usaha baik berbentuk dana ataupun barang usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun perorangan, dengan begitu dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mewujudkan tujuan SDGs atau pembangunan berkelanjutan di kota Bandar Lampung.

I. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama penulis memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan penelitian peran zakat dalam mewujudkan SDGs, adapun beberapa karya ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Nurma Khusna Khanifa yang berjudul, *Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo*. Menjelaskan bahwa, Filantropi bagi masyarakat muslim Indonesia telah menjadi bagian penting diibaratkan dengan dua sisi logam mata uang. Islam sendiri memiliki tradisi turun

temurun berdasar *masalah 'ammah* dalam menghimpun dan menyalurkan ziswaf sebagai gagasan filantropi. Disinilah adanya relevansi antara tujuan ZISWAF dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara garis besar gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, kebersihan lingkungan. Ziswaf sendiri bagian dari ritual ibadah masuk kategori *grairu mahdhah* memiliki dimensi tanggung jawab dan kedermawanan.¹⁶

2. Farhan Amymie dengan judul *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Menjelaskan bahwa, penulis bahas yaitu tentang Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan, berdasarkan data yang penulis peroleh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi tersebut. (1) UPZ pada Kantor Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang berada di daerah tersebut. (2) UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut. (3) UPZ pada

¹⁶ Nurma Khusna Khanifa, *Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo*. (Skripsi progam studi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo, 2018), hal.18.

Perusahaan Swasta dan Unit Usaha milik orang muslim setempat yang berada di bawah koordinasi Provinsi yang bersangkutan. (4) Perorangan. BAZNAS memiliki 5 (lima) fokus kategori penyaluran dana, yakni (1) ekonomi; (2) sosial dan kemanusiaan; (3) kesehatan; (4) pendidikan; dan (5) dakwah. Masing-masing fokus tersebut sesuai dengan dimensi maqasid syariah yakni secara berturut-turut (1) Harta; (2) Keturunan; (3) Jiwa; (4) Pendidikan; dan (5) Dakwah. Hal ini perlu dipertahankan dan bahkan disesuaikan terus menerus terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana juga maqasid syariah yang sesungguhnya sangat fleksibel penerapannya terhadap perkembangan zaman yang ada). Kedua, Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1, Menghapus Kemiskinan, Goal 2, Mengakhiri kelaparan, Goal 3, Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4, Pendidikan Bermutu, dan Goal 5, Air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai

dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat. Irisan antara SDGs dan Zakat di implementasikan oleh BAZNAS Jawa Barat Menjadi 5 program unggulan mereka yakni, (1) Jabar Peduli, (2) Jabar Sehat, (3) Jabar Mandiri, (4) Jabar Cerdas, dan (5) Jabar Taqwa.¹⁷

3. Penelitian skripsi Yuni Septi Nurhayati dengan judul, *Peran Zakat Produktif Terhadap Pencapaian Sdgs Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baznas Kota Yogyakarta)*, menjelaskan bahwa peran zakat produktif terhadap pencapaian SDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Baznas Kota Yogyakarta itu sangat besar pengaruhnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta lapangan yang penulis temui dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff-staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif di Baznas Kota Yogyakarta. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi produktif dalam program Jogja Sejahtera di tiga bidang usaha mazakki ini juga dibuktikan dengan keberhasilan seorang *mustahiq* yang sudah bisa dan mampu untuk berqurban pada Idul Adha tahun 2018 ini.¹⁸

4. Nelti Erwandari (2017) dengan judul penelitian “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDG’s) Dalam Meningkatkan

¹⁷ Farhan Amymie, *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*, (Skripsi Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hal. 15.

¹⁸ Yuni Septi Nurhayati, *Peran Zakat Produktif Terhadap Pencapaian Sdgs Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baznas Kota Yogyakarta)*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syari’ah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hal. 80.

Ketahanan Pangan di Provinsi Riau” Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan implementasi *sustainable development goals* (SDGs) dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini, pemerintah Riau menyadari bahwa mengimplementasikan program SDGs akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Riau, termasuk petani kecil. Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan UNDP dan *Tonoto Foundation* dengan membentuk sekretariat SDGs di kantor Bappeda pada Mei 2016 dengan tujuan untuk mengumpulkan kemitraan dan pemerintah untuk tercapainya SDGs. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Riau memiliki strategi yang ingin dicapai yang tertuang di dalam Badan Ketahanan Provinsi yaitu:

- a. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Tercapainya ketersediaan pangan utama, yaitu beras.
- c. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- d. Tercapainya ketersediaan informasi, pasokan harga, dan akses pangan strategis di daerah.
- e. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
- f. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- g. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

Dari ketujuh sasaran strategis tentang ketahanan pangan yang ingin dicapai, terdapat 3 sasaran strategis yang mengarah kepada peningkatan ketahanan pangan utama. Sasaran strategis tersebut adalah:

- a) Tercapainya koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b) Tercapainya ketersediaan pangan utama, yaitu beras dan tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- c) Tercapainya ketersediaan pangan utama, yaitu beras dan tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.¹⁹

Yang menjadi pembeda antara skripsi ini dan terdahulu yaitu, peneliti meneliti khususnya daerah Kota Bandar Lampung melalui data yang diambil dari badan amil zakat nasional yang terletak di daerah bandar lampung, yang mana melalui kerja zakat dapat terwujudnya tujuan-tujuan dari *Sustainable Development Goals* yang ada di kota bandar lampung.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode ini adalah metode penelitian

¹⁹ Erwandari, Nelti. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 5, No. 3: 875-888.

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Penelitian bersifat kualitatif, hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰ Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field research* yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan peran zakat dalam mewujudkan *Sustainable development goals* (SDGs) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Penelitian Kepustakaan

Selain menggunakan *field research* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.²¹ Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, khususnya teori-teori mengenai zakat dalam mewujudkan tujuan SDGs dan peran zakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal. 9.

²¹ Hadi Su'trisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002), hal. 144.

c. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan. Dalam metode ini yang penulis lakukan adalah bagaimana suatu pengaplikasian peran zakat dalam mewujudkan SDGs untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh lembaga Baznas Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.²² dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dengan mewawancarai secara langsung staff BAZNAS yang bernama Rizki Fitriansyah yang diajukan oleh peneliti. Sumber informasi ini memberikan data-data secara langsung seperti data pengumpulan, pendistribusian dana zakat dan data penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS untuk kemudian disiarkan

²² Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 102.

langsung yang datanya bersifat orisinil. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi untuk menganalisis peran zakat dalam mewujudkan SDGs untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

b. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.²³ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga ataupun instansi yaitu seperti sejarah, struktur, visi misi, fungsi, tujuan dan program-program dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji. Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik sama dan semua individu yang menjadi sumber penelitian sampel.²⁴ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pengelola dana ZIS (Zakat,

²³ *Ibid*, hal. 103.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 53.

Infraq, dan Shadaqah yang ada di dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel adalah sebagian atau juga himpunan bagian dari suatu populasi. Sampel dapat didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi akibatnya sampel selalu bagian yang lebih kecil dari populasi.²⁵

Sampel pada penelitian ini mencari data dengan menggunakan teknik *Perposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan sesuai dengan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya atau teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, sampel pada penelitian ini adalah terdiri dari pengurus yang terfokus pada bidang yang menjadi bahan penelitian dan 10 orang penerima bantuan dana atau zakat dari lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, adapun metode tersebut ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis ataupun psikologis.

²⁵ Istijianto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005), hal. 109.

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti adalah mendatangi langsung lokasi BAZNAS Kota Bandar Lampung. hal ini ini dilakukan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian, dalam hal ini meliputi BAZNAS Kota Bandar Lampung.²⁶

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.²⁷ Metode *Interview* yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan oleh responden.²⁸ sedangkan jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan sistem pengelola dana zakat dan peran zakat dalam

²⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisis*, (Jakarta, PT. Bumi aksara, 2006), hal. 203.

²⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), hal.19.

²⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2007), hal. 83.

mewujudkan SDGs dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat (*Mustahiq*). Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam kepengurusan BAZNAS kota Bandar Lampung khususnya pada bagian kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai sumber pengembangan zakat produktif di BAZNAS kota Bandar Lampung serta para *mustahiq* penerima bantuan zakat dari lembaga BAZNAS.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti dokumen laporan pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakat, pendayagunaan dana zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan pokok penelitian.

5. Pengolahan Data dan Analisis

Dari data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati,²⁹ Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan peran zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mendapatkan keadaan dan yang berlangsung peranan zakat tersebut kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. dalam penarikan kesimpulannya dari hasil data penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang umum.³⁰

²⁹ Koentjoningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 46.

³⁰ Lexy J, Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2001), hal. 8.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.

Fiqh Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum).” Menurut Ash-Shiddieqy zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan.³¹

Al imam An Nawawi mengatakan bahwa zakat berasal dari kata *zaka* yang mempunyai arti tumbuh dengan subur, Zakat ditinjau dari segi bahasa, mempunyai arti yaitu *al barakatu* keberkahan, *al nama'* pertumbuhan dan perkembangan *ath-tharatu* kesucian, dan *as-shalahu*

³¹ i Tika i Widiyasuti, i *Model i Pendayagunaan i Zakat i Produktif i Oleh i Lembaga i Zakat i Dalam i Meningkatkan i Pendapatan i Mustahiq*, i *Jebis*, i Vol. i 1 no. i 1, i edisi i Januari i 2015, i hal. i 4

baik.³² Zakat adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepada setiap umat muslim yang memiliki harta mencapai satu nishab, dan hukumnya fardu'ain atas semua orang islam yang merdeka. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.³³

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan dapat menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³⁴ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah As-Syam [91]: (9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ ٩

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*
(QS. As-Syam Ayat 9)

Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang dan berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, menurut ajaran islam, harta yang dizakati tersebut akan tumbuh berkembang. Adapun menurut *syara'* yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian wajib secara *syara'* dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu,

³² Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Dipantara, 2016), hal. 49

³³ Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013), hal. 5

³⁴ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk. *Pelaporan ZAKAT pengurang pajak penghasilan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Indonesia, 2006), hal. 14

Ibnu Taimiyah berkata, “ jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah.”³⁵

Adapun beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya jika milik sempurna dan mencapai haul atau nishab selain barang dan tambang, tanaman rikaz.
 2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari’.
 3. Mahmud syalhut, seorang ulama kontemporer dari mesir beliau mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
 4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dan dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.
- Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas bahwa zakat mengeluarkan sejumlah harta tertentu sesuai dengan nishabnya yang

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta:Mizan, Pustaka Litera antar Nusa, 1999), hal. 35

diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.³⁶

2. Zakat dalam Al-Qur'an dan Hadis

a. Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an

Merupakan salah satu rukun islam yang harus dikerjakan, hukum zakat adalah wajib aini yang artinya kewajiban yang ditetapkan untuk diri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Adapun dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: [2]: 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

³⁶ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hal. 187-188

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (QS. Al-Baqarah [2]: 277).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah. (QS. Al- Anbiya [21]: 73)

b. Dasar Hukum Zakat dalam Hadis

Begitupun dalam hadis dijelaskan mengenai zakat melalui hadis dari Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata bahwasanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wata’ala.” (HR. Bukhari no. 25; Muslim no. 22)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافِظٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ إِنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ

Artinya: “Lima perkara yang apabila dikerjakan oleh seseorang dengan keimanan, maka dia akan masuk surga; yaitu barangsiapa yang menjaga shalat lima waktu beserta wudhunya, rukuknya, sujudnya dan waktu-waktunya, melaksanakan puasa ramadhan, haji ke baitullah jika mampu menunaikannya, menunaikan zakat dengan kesadaran jiwa, serta menunaikan amanat” [HR. Abu Dawud: 429. Dinilai hasan oleh al-Albani].

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika beliau mengutus ke negeri Yaman:



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. Mengutus Mu’adz r.a. ke yaman. Pesan beliau kepada Mu’adz: “serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin”. [hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor:1395]³⁷

³⁷ Imam Az-Zabidi, Ringkasan hadis shahih Al-Bukhari, (Jakarta:Pustaka Amani cet,1, 2002), hal.328.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Bahkan dalam sejarah Islam, sahabat Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa “demi Allah akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara shalat dengan zakat”.

Secara sekilas, ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh zakat telah mendukung apa yang diharapkan oleh SDGs, karena zakat bekerja dalam bidang sosial yang membantu mensejahterakan umatnya ini sejajar dengan pencapaian-pencapaian tujuan SDGs.

3. Mustahiq Zakat

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: [9]: 60).³⁸

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media:2002), hal. 156

Dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja. Namun, ibn Taimiyah berpendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan *mustahiq* secara menyeluruh, tetapi pendistribusiannya diutamakan pada golongan yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam al-Qur'an yang telah menunjukkan urutan prioritas.³⁹

Adapun penjelasan tentang delapan asnaf tersebut ialah sebagai berikut:



a. Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan. Imam Asy Syafi'i pernah mengatakan bahwa

³⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2013), hal.106

orang fakir itu adalah orang yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁰

Sedangkan menurut Imam Hanafi orang fakir adalah orang yang memiliki harta yang kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta yang cukup nishab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer maka orang yang memiliki harta seperti itu lebih baik tidak boleh diberikan zakat. Dengan alasan bahwa orang yang mempunyai harta sampai pada nishabnya maka ia wajib membayar zakat, bukan menerima zakat.⁴¹

b. Miskin

Adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian namun masih belum mencukupi keperluan dalam kesehariannya. Miskin adalah orang yang dikasihani, orang miskin mempunyai penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena itulah perlu dikasihani.⁴²

c. Amil Zakat

Adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga, hendaknya diharapkan bahwa zakat

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konseptual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 279

⁴¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 189-190

⁴² Syaichul Hadi Pemono, *Pembagian Zakat maal Kepada Delapan Asnaf, Dalam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan*, (Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan, 1990), hal. 124

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan meratakan rezeki dan menciptakan keadilan sosial.⁴³

d. Muallaf

Adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat, Secara bahasa muallaf berasal dari kata '*allafa*' yang bermakna '*saiyarahu alifan*' yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.⁴⁴ Muallaf orang-orang yang perlu dijinakkan atau dilunakkan hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau membeli kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum muslim, atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat muslim.

e. Riqab

Riqab artinya budak yang baru dimerdekakan, Maksudnya adalah karena islam tidak menyukai adanya perbudakan maka melalui instrumen zakat inilah budak-budak dibebaskan sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan dengan yang lain, Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai *riqab*. Maksud *riqab* dalam oleh Qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah "*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan*".⁴⁵

⁴³ Farida Prihatini dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Papyrus Sinar Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.79

⁴⁴ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syaria*, volume 7 nomor 2, 2019, hal. 9

⁴⁵ *Ibid*, hal. 11

Dalam hal ini zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka, termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

f. Gharim

Gharim (orang-orang yang berhutang), Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan. Gharim adalah orang yang berhutang, orang yang memiliki hutang bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-nya dan ia kesulitan membayarnya, maka iya diberi zakat untuk menutup hutangnya, atau semata-mata untuk emenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Berdasarkan sabda nabi “ *Tidaklah pantas meminta-minta kecuali bagi tiga orang yaitu, orang yang mempunyai kefakiran yang sangat, orang ang memiliki hutang yang berat, orang yang memiliki tanggungan darah, yag menyakitkan*”.

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.⁴⁷ Gharim terbagi menjadi dua macam pertama mereka yang pernah berhutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan hidup dan kini disebabkan kemiskinan yang sangat tidak mampu membayar kembali utangnya, Orang yang berhutang untuk mendamaikan kelompok yang bertikai dan untuk kebajikan.

⁴⁶ Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif, Jurnal Al- Mashlahah i volume 1 nomor 1, 2013, hal. 4

⁴⁷ Website BAZNAS di: <https://baznas.go.id/asnaf> (10 Maret 2020).

g. Fisabilillah

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “*sabilillah*” (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, *sabil* ialah jalan. *Sabilillah* ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, Menurut empat mazhab, *sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi ‘Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah *sabilillah*.

Sabilillah adalah jalan yang diridhoi Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan, menurut Yusuf Al-Qardhawi, yang dimaksud *sabilillah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bahwa arti asal kata ini menggunakan bahasa ialah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakwa kepada Allah meliputi amal perbuatan shaleh baik yang bersifat pribadi maupun umum.
2. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya untuk itu (jihad).⁴⁸

⁴⁸ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, “*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*”, *Jurnal Ekonomi Syaria*, volume 7 nomor 2, 2019, hal. 13-14

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanannya ini adalah untuk keperluan baik seperti musafir. Jumhur ulama mengkiaskan ibnu sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya.⁴⁹

para ulama berpendapat bahwa *fi sabilillah* mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar di jalan juga termasuk dalam ibnu sabil. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil*.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dari delapan golongan *mustahiq* zakat yang disebutkan. Urutan *mustahiq* yang disebutkan lebih dulu merupakan golongan yang sangat membutuhkan bantuan zakat, dibandingkan dengan golongan yang disebut kemudian, memberikan prioritas bagi fakir dan miskin dalam menerima zakat. Kebijakan distribusi yang diajarkan oleh islam sangat berkaitan dengan

⁴⁹ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 303

⁵⁰ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syaria*, volume 7 nomor 2, 2019, hal. 14

harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepatian sistem ekonomi, hukum dan sosial yang menjamin agar harta dapat tersebar dengan luas di masyarakat. Menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta kekayaan, mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain. Menciptakan distribusi yang adil merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Islam menghendaki kesamaan pada setiap orang dalam memperoleh peluang mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, maupun warna kulit.⁵¹

Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat menurut salah satu hadis Rasulullah SAW, yang dapat mengamati orang-orang yang akan menerima zakat adalah Hadis Qubaishah bin Makhrij yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam kitab shahihnya, didalamnya terdapat penjelasan bahwa seorang tidak berhak menerima zakat kecuali dia mengalami satu dari tiga hal, yaitu:

⁵¹ Ruslan, Abdul Ghofur, Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2013), hal. 88

1. Seorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
2. Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
3. Seseorang miskin dalam hal ini dipertegas oleh pilihan tiga dari kaumnya, orang ini memang miskin, maka dengan ini ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.⁵²

4. Syarat Wajib Zakat

Rukun merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Orang yang berzakat (muzaki)
2. Harta yang dikenakan zakat dan sudah mencapai nishab
3. Orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)

Syarat zakat yaitu:

Adapun syarat zakat ialah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh ketiga hal tersebut diatas, syarat ini dijelaskan didalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai berikut:

- a) Syarat yang berzakat adalah islam, akil baligh, dan orang yang memiliki harta telah memenuhi syarat.

⁵² Firdaningsih, 'Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 7 No. 2, 2019

- b) Syarat harta yang dizakatkan ialah, harta yang baik (halal), harta yang dimiliki sepenuhnya oleh muzaki dan mencapai nishab atau jumlah tertentu serta telah tersimpan selama satu tahun.
- c) Syarat yang menerima zakat (mustahiq) telah tertera pada QS. At-Taubah ayat 60.⁵³

5. Hikmah Zakat

Zakat mempunyai berbagai hikmah yaitu zakat dapat membersihkan harta, menambah berkah, menjaganya dari kehancuran dari Allah SWT, mencegah dari kerusakan dan kehilangan harta dari orang yang mengeluarkan zakat karna zakatnya.

Menurut Ali Hasan hikmah zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Membersihkan harta.
- b) Membersihkan jiwa pemberi zakat (muzaki) dari sifat kikir (bakhil).
- c) Membersihkan jiwa penerima zakat (mustahiq) dari rasa dengki.
- d) Mencegah kemaslahatan umum yang terkait dengan kehidupan dan kebahagiaan umat manusia.
- e) Memberdayakan masyarakat yang lemah.⁵⁴

6. Konsep Lembaga Zakat

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin, menyatakan bahwa *Al- Amil* adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah)

⁵³ Kajian Fiqh kontemporer, hal. 160

⁵⁴ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah:103, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Desember 2018, hal. 85

mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Menurut Ad-Dimasyqi, pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya. Orang yang termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Berdasarkan pengertian lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat yaitu lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Allah SWT telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat. Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama, mengumpulkan dari orang-orang kaya *muzakki* dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahiq*. Kedua, membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki*

dan fakir miskin agar menjadi *muzakki*. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahiq*⁵⁵

7. Zakat Sebagai Sumber Pembentukan Dana

a. Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam

Pada sisi yang lain, salah satu instrumen pembangunan yang digunakan oleh ekonomi islam adalah zakat. Ini dijelaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara, terutama dalam perannya untuk mereduksi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan, zakat juga merupakan sumber dana pemangunan yang cukup potensial dalam negara islam atau negara yang penduduknya mayoritas muslim.⁵⁶

Menurut Ibnu Taimiyah ia menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan keuangan sesuai syariah dibagi menjadi tiga tipe, yaitu *ghanimah* (*rampasan perang*, *sedekah (zakat)* dan *Fai*’, Suwarsono mengatakan bahwa “zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah Islam, dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lain. Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan yang telah mencapai batas ukuran yang ditentukan.

⁵⁵ Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2015, hal. 93

⁵⁶ Bambang Sudibyo, *Peran Zakat dalam Sustainable development Goals untuk pencapaian Maqosyid Syariah*, Cetakan I Jakarta: Pusat 2017, hal. 16

Sebagian para ulama dan ekonomi islam mengatakan bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara islam, dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya dari tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara seperti yang dikatakan oleh Daradjat bahwa zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian islam, karena zakat bisa dijadikan sumber dana bagi menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat islam. Zakat bukan hanya merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi islam, maka dari itu pemahaman tentang masalah zakat berarti pula secara bersamaan telah memahami ajaran islam itu sendiri. Untuk itu dalam rangka peningkatan akumulasi dana zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan, maka sosialisasi pemahaman nilai-nilai islam kepada rakyat sangat penting untuk diperhatikan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran rakyat untuk mengumpulkan zakatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mannan bahwa semakin besar pengaruh islam pada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutan zakat, sehingga distribusinya pun dapat berjalan dengan mulus, selain kemungkinan penghindaran pembayaran pun semakin kecil. Maka

negara-negara islam harus melakukan upaya yang tulus untuk menanamkan jiwa islami dikalangan masyarakat muslim. Dengan demikian, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

b. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan ekonomi rakyat yang dimaksud disini adalah pedayagunaan potensi masyarakat (rakyat) berdasarkan perspektif mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa tugas amil dan pemberdayaan ini adalah mengajak paramuzaki untuk menyadari bahwa pengentasan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat dapat dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan (*sustainable*). Sangat mungkin untuk mengembangkan peran muzaki bukan hanya sekedar pemberi, melainkan juga menjadi konsumen atau pengguna jasa atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh para *mustahiq*.

Harta zakat dipandang sebagai modal dana berputar (*revolving fund*) yang penggunaanya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin. Zakat akan sangat efektif jika diguakan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti yang dikatakan oleh Al-Bakri bahwa untuk membantu permodalan fakir miskin, islam telah mewajibkan zakat kepada

para pemilik kekayaan dan menjadikannya sebagai salah rukun islam yang lima. Dikatakan pula bahwa dana yang terhimpun dari zakat tidak harus diberikan kepada orang-orang fakir miskin begitu saja, tetapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan dana itu untuk dikembangkan kedalam bentuk usaha sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau bisa melalui pelatihan-pelatihan dibidang pertanian, pertukangan, manajemen, bisnis, dan lain-lain. Hal ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak terutama para pembesar yang punya kepedulian terhadap nasib rakyatnya yang terilit oleh kemiskinan.⁵⁷

c. Zakat dan Kerja Keras untuk Kemakmuran Umat Islam

Kebahagiaan hidup diakhirat memang merupakan tujuan bagi setiap umat islam, namun kehidupan dunia tidak boleh dilupakan agar jalan menuju kehidupan akhirat tersebut dapat dicapai dengan baik tanpa gangguan ekonomi, misalnya karena kekurangan pangan. Allah SWT telah menganjurkan dalam hubungannya dengan kerja keras ini, dimana Allah SWT berfirman pada surah Al-jumu'ah:10 sebagai berikut:

Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.

⁵⁷ Ibid, hal. 400

Demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai kemakmuran dunia jika tidak ada kerja keras, hubungan antara kerja keras dan perintah zakat sangatlah erat. Jika kita cermati perintah zakat mengisyaratkan kita untuk bekerja keras, karena sebelum kita dapat menunaikan zakat kita harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkan harta kekayaan yang banyak sehingga mencapai *nishab*. Dan bagi orang yang berpikiran rasional akan selalu melakukan hal untuk meningkatkan ibadahnya dalam bentuk mengeluarkan zakat dan sedekah dari kekayaan yang telah ia dapatkan melalui kerja kerasnya. Karena kekayaan yang kita dapatkan itu merupakan rezeki yang telah disediakan oleh Allah kepada siapa yang mau mencarinya. Dan bagaimana hubungan zakat dengan kemakmuran, dapat dilihat melalui bagaimana kemakmuran itu dapat terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemakmuran dalam suatu lingkungan masyarakat dapat terjadi bila semua lapisan dalam masyarakat tersebut sudah bisa menikmati kehidupan yang layak. Tidak ada lagi kesenjangan yang besar diantara golongan dalam arti yang kaya menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membantu yang miskin.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hal. 402

B. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

1. Tinjauan *Sustainable Development Goals* (Pembangunan Berkelanjutan)

Kata *sustainable* pada dasarnya dapat diartikan juga dengan *capable of being sustained* atau kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Sejak pertama kali didefinisikan oleh komisi Brundland, telah banyak pakar dan praktisi memberikan definisinya sendiri mengenai pembangunan berkelanjutan, namun definisi-definisi tersebut sukar untuk ditangkap. Pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan oleh *World Commission On Environment and Development* (Kmisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan) melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama), dalam laporannya tersebut, komisi satu isu utama yang dianggap penting dalam kaitan dengan masalah ekologi dan lingkungan, yaitu bahwa pada kenyataannya banyak kegiatan pembangunan telah mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan, serta kerusakan lingkungan.

Sustainable development is development that meets of the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs.

Berdasarkan defisini Bruntland tersebut dapat dimaknai bahwa dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pada warisan antargenerasi dan adanya kebutuhan untuk membatasi pembangunan. Hal yang prinsip

dalam definisi ini adalah menekankan pada konservasi dan menjamin generasi mendatang dapat menikmati pilihan-pilihan seperti sekarang.

Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut kementerian lingkungan hidup (1990) pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*;
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya
3. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya

belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan.⁵⁹

Dengan berakhirnya era MDGs, Selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (*sustainable development goals*), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya.⁶⁰

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs, Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deflation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Adapun tiga pilar yang menjadi

⁵⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo (dkk), *Pembangunan Berkelanjutan dari MDGs ke SDGs*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2019), hal. 11

⁶⁰ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, Social network Jurnal, Volume 6 nomor 2, hal. 159

indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.⁶¹

Dalam tatanan yang lebih luas, dunia juga sedang mencari tujuan-tujuan bersama yang disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh negara. Tujuan dimasa millennium itu disepakati untuk dicapai pada tahun 2015, fokus dari tujuan dimasa millennium ini lebih banyak pada pengentasan kemiskinan ekstrim di dunia. Namun, faktanya MDGs belum dapat memberikan perbedaan yang berarti dalam mengambil peran memberantas kemiskinan. Banyak negara-negara khususnya benua Afrika, yang masih sangat jauh tertinggal dan tidak dapat mencapai targetnya. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang gagal dalam mewujudkan MDGs, utamanya dalam hal menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Setelah gagal dengan MDGs, pada tahun 2015 PBB kembali menginisiasi kesepakatan baru dengan judul besar *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan

⁶¹ Wahyuningsih, *Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Bisnis Manajemen, Volume 11 nomor 3: 2017, hal. 391

pembangunan berkelanjutan, SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

2. Tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Sustainable Development Goals mempunyai 17 tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Adapun 17 tujuan yang termasuk kedalam SDGs yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;

5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Menindaklanjuti publikasi *Our Common Future*, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa tanpa pedoman atau prinsip, tidak mungkin dapat menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan berkelanjutan atau tidak. Selain itu, sejalan dengan Agenda 21, yang dideklarasikan pada Konferensi PBB tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pemangunan, atau KTT Bumi di Rio de Janeiro, prinsip-prinsip yang digariskan dalam

Deklarasi RIO tentang Lingkungan dan Pembangunan dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

Prinsip 1. Manusia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, selaras dan harmoni dengan alam.

Prinsip 2. Negara memiliki sesuai dengan piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan ekonominya sendiri-sendiri.

Prinsip 3. Hak atas pembangunan harus dilaksanakan secara berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Prinsip 4. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak boleh dianggap terpisah darinya.

Prinsip 5. Semua negara dan semua orang akan bekerja sama dalam tugas penting untuk memberantas kemiskinan sebagai kebutuhan yang mutlak bagi pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 6. Situasi khusus dari kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang kurang berkembang dan mereka yang paling rentan terhadap gangguan lingkungan, harus diberikan prioritas khusus.

Prinsip 7. Negara-negara harus bekerjasama dengan semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi.

Prinsip 8. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh rakyatnya, negara harus mengurangi dan menghilangkan pola-pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan demografis yang lebih sesuai.

Prinsip 9. Negara-negara harus bekerjasama untuk memperkuat pembangunan kapasitas endogen untuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologi, adaptasi, difusi dan transfer teknologi, termasuk teknologi baru dan inovatif.

Prinsip 10. Isu-isu lingkungan paling bagus ditangani dengan partisipasi seluruh warga masyarakat sesuai dengan tingkatannya.

Prinsip 11. Negara-negara harus memberlakukan undang-undang lingkungan yang efektif.

Prinsip 12. Negara-negara harus bekerjasama untuk mempromosikan sistem ekonomi internasional yang mendukung dan terbuka yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara untuk lebih baik mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

Prinsip 13. Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang kewajiban dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.

Prinsip 14. Negara-negara harus bekerjasama secara efektif untuk menghapus atau mencegah relaksi dan transfer ke negara lain suatu kegiatan dan substansi yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau berbahaya bagi kesehatan manusia.

Prinsip 15. Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara sesuai dengan kemampuannya.

Prinsip 16. Otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi.

Prinsip 17. Penilaian dampak lingkungan, sebagai instrumen nasional, harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan dan mungkin memiliki dampak negatif signifikan terhadap lingkungan.

Prinsip 18. Pendapatan negara harus segera memberitahukan kepada negara lainnya informasi tentang setiap bencana alam atau keadaan darurat lainnya, yang cenderung menghasilkan efek berbahaya bagi lingkungan dinegara-negara lain tersebut.

Prinsip 19. Negara harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan tepat waktu, kepada negara tetangga yang berpotensi terkena dampak lingkungan lintas batas yang signifikan dan harus berkonultasi dengan negara-negara lain tersebut pada tahap awal dan dengan itikad yang baik.

Prinsip 20. Peremuan memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan.

Prinsip 21. Kreatiitas, cita-cita dan keberanian para pemuda dunia harus dimobilisasi unuk menempa kemitraan global guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi semua.

Prinsip 22. Masyarakat adat dan komunitasnya, serta masyarakat lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena mereka mempunyai pengetahuan dan praktek-praktek tradisonal (kearifan lokal)

Prinsip 23. Lingkungan dan sumberdaya alam orang (masyarakat) yang mengalami penindasan, dominasi dan pendudukan harus dilindungi.

Prinsip 24. Perang mengakibatkan kehancuran pada pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu ngara harus menghormati hukum internasional memberikan perlindungan bagi lingkungan dimasa konflik bersenjata dan bekerjasama dalam pengembangan lebih lanjut.

Prinsip 25. Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Prinsip 26. Negara harus menyelesaikan semua sengketa lingkungan secara damai dan dengan cara yang tepa ssuai dengan piagam PBB.

Prinsip 27. Negara dan rakyat harus bekerjasama dengan itikad baik dan dengan semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-pinsip yang

terkandung dalam deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional dibidang pembangunan berkelanjutan.

Selain prinsip tersebut, secara garis besar tujuan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada prinsip sebagai berikut: 1) *Environmentally sustainbale/Ecological Balance*, 2) *Socially responsible/Social Progress*, 3) *economically viable/Economic Growth* dan 4) Kelembagaan berkelanjutan (*Institutional Sustainability*).⁶²

SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No One Left Behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal".⁶³ Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan

⁶² Suryo Sakti Hadiwijoyo (dkk), *Pembangunan Berkelanjutan dari MDGs ke SDGs*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2019), hal. 14-18

⁶³ Helly Khairuddin, Erwin, *Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (Sdgs)*, Jurnal Selodang Mayang, Vol. 4 No. 2, Agustus 2018, hal. 107

Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring SDGs. Membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Disamping itu, sumber pembiayaan SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid, hal. 108*

C. Teori Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja, usaha atau sebagainya.⁶⁵ Sedangkan dalam Manajemen, pendapatan (income) adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya.⁶⁶

Pendapatan dapat diartikan yaitu penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atau jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.⁶⁷ Sebagaimana pendapat di atas, bahwa pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, oleh karenanya setiap orang yang bergerak dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan di sektor informal ataupun perdagangan, dan berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan pendapatan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 79

⁶⁶ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

⁶⁷ Munawir, S., *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 26

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Pendapatan perorangan merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang untuk dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurang dengan pajak penghasilan.
- b) Pendapatan Disposable adalah jumlah pendapatan yang saat ini dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yakni pendapatan perorangan yang dikurangi oleh pajak penghasilan.⁶⁸

Menurut Partadiredja, pendapatan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu :

- a. Pendapatan sektor formal, meliputi pendapatan berupa uang dari gaji dan upah, hasil investasi, pendapatan berupa barang atau lainnya;
- b. Pendapatan sektor informal, meliputi pendapatan dari usaha yang meliputi usaha sendiri, komisi, dan pendapatan keuntungan sosial;
- c. Pendapatan sektor subsisten, meliputi produksi dengan konsumsi yang terletak di satu tangan atau masyarakat kecil. Apa yang diproduksi sendiri untuk dikonsumsi sendiri, dalam hal ini tidak mutlak dilakukan satu orang. Mungkin juga satu keluarga atau juga sekelompok orang.⁶⁹

⁶⁸ R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral, 1999), hal. 5

⁶⁹ Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*. (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1998), hal. 59

2. Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (*Household*)

a. Pendapatan rumah tangga dalam konteks konvensional

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain.⁷⁰ Dengan kata lain, pendapatan rumah tangga merupakan balas jasa faktor produksi tenaga kerja, balas jasa kapital, maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pendapatan sektor pertanian dan non pertanian. Sumber pendapatan dari sektor pertanian terdiri atas pendapatan dari usaha tani, ternak, buruh petani, menyewakan lahan, dan bagi hasil. Sumber pendapatan dari sektor non pertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh nonpertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya. Pendapatan rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi secara langsung, di samping pangsa pengeluaran pangan, nilai tukar petani, kemiskinan, dan kecukupan kalori.

⁷⁰ <https://www.bps.go.id/istilah/index.html> (diakses: 10 Februari 2020)

b. Pendapatan rumah tangga dalam konteks perspektif islam

pendapatan dalam konteks rumah tangga sangat terkait dengan istilah *shadaqah*. Pengertian *shadaqah* disini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena *shadaqah* konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: *pertama: shadaqah wajibah* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini seperti warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya, seperti *jiwar* (bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga) dan *masaadah* (memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah). *Kedua: shadaqah nafilah (sunnah)* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis amal kariatif, seperti sedekah.⁷¹ Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan islam adalah *maqasid Syariah*. Sistematika hirarki yang dikembangkan fuqaha dalam memenuhi aspek-aspek tersebut mengacu pada segala pusat dengan urutan yaitu *ad-daruriyyah*, *al-hajjiyyah*, dan *at-tahsiniyyah*.⁷²

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada

⁷¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 135

⁷² Almizan, Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016

kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, maka seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau juga dapat membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya dapat bertambah”.⁷³

Tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, hubungan antara keduanya merupakan suatu hubungan yang sangat penting dalam permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan maka pengeluaran konsumsi juga akan

⁷³ Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 3-4

meningkat, tinggi rendahnya pengeluaran tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatannya.⁷⁴ Dalam mendistribusikan pendapatannya atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi maka harus adanya pola konsumsi, adapun konsumsi diartikan sebagai pengguna barang-barang dan jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, maka dari itu pola konsumsi dapat disimpulkan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi.

Sedangkan dalam perspektif ekonomi islam, islam juga mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia dapat berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui Al-Qur'an dan hadistnya agar manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan anjuran Allah SAW dan Rasulullah SAW akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Dalam hal ini terdapat nilai-nilai konsumsi dalam perspektif ekonomi islam, yaitu:

1. Tauhid (Kesatuan)

Dalam islam kegiatan konsumsi merupakan beribadah kepada Allah SWT, sehingga selalu dalam hukum Syariah (Allah). Oleh

⁷⁴ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireun", *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireun Aceh*, Vol. IV No. 7, hal. 9

karena itu orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintahnya, dan memuaskan dirinya dengan barang yang dianugerahkan dan diciptakan oleh Allah untuk umat manusia.

2. Kemurahan Hati dan Keadilan

Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (Qs al-Maidah :96). Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam memenuhi kebutuhan diri juga harus melihat dimana kita akan berbelanja. Ini dimaksudkan agar uang itu tidak berputar kepada pemilik modal besar saja, tetapi juga pedagang yang memiliki modal kecil.⁷⁵ Pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariahnya.

3. Kehendak bebas

Alam semesta ini hanyalah milik Allah SWT, yang memiliki kuasa (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-Nya. Manusia diberi kekuasaan agar dapat mengambil keuntungan, dan memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang yang di ciptakan oleh Allah.

⁷⁵ Abdul Hamid, Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat, *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 7, No. 2, September 2018, hal. 22

4. Amanah (Pertanggung Jawaban)

Manusia merupakan khalifah Allah, Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dan untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Dalam hal melakukan konsumsi ini, manusia dapat berkehendak bebas akan tetapi tetap mempertanggung jawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat kelak. Pertanggung jawaban sebagai seorang muslim bukan hanya kepada Allah SWT semata namun juga kepada lingkungannya.

5. Halal

Dalam ajaran Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta menghasilkan kemaslahatan untuk umat, baik secara *materiil* maupun spiritual. Sedangkan sebaliknya, benda-benda yang tidak dapat dikonsumsi yakni, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah yang artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa*

(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (QS. Al-Baqarah: 173).

6. Sederhana

Islam melihat perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan) yaitu membuang-buang harta dan menghamburkannya tanpa maksud yang jelas/manfaat dan hanya memperturukkan hawa nafsu semata. Allah sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas, sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihlebian” (Qs: Al-Araf, ayat 31).*⁷⁶

⁷⁶ Almizan, Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 20

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Konseptual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004
- A Karim Adiwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Baznas, *Buku Statistik Zakat Nasional*, (diterbitkan oleh Bagian SIM & Pelaporan: 2016.
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara: 2007
- Dedi Pranoto, *Sistem Ekonomi Keuangan Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Laziswaf kota Cirebon*, Skripsi Kementrian Agama RI IAIN Syekh Nurjati, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media: 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Farhan Amymie, *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*, Skripsi Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Farida Prihatini dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia* Jakarta: Papas Sinar Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk. *Pelaporan ZAKAT pengurang pajak penghasilan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Indonesia, 2006
- Hadi Pemono Syaichul, *Pembagian Zakat maal Kepada Delapan Asnaf, Dalam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan*, (Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan, 1990
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Kencana Prenadamedia Group, 2014

Imam Az-Zabidi, Ringkasan hadis shahih Al-Bukhari, Jakarta; Pustaka Amani cet.1, 2002

Institut Agama Islam Negeri, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, IAIN: 1990

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Istijianto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005

Khanifa Khusna, *Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo*. Skripsi program studi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo, 2018

Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016

Koentjoningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2010

Lexy J, Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Resda Karya, 2001

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2001

Munawir.S, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2002

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003

Mustafa Edwin, et. al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010

Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE-UGM, 1998

Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: Dipantara, 2016

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo Bandung, 2012

- Robbins P. Stphen dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Selemba Empat, 2012.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2013
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *akuntansi syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo (dkk), *Pembangunan Berkelanjutan dari MDGs ke SDGs*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2019
- Soediro Mangundjojo R, *Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Direktorat Jendral, 1999
- Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Syahatah Husyn, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progresif: 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2012
- Yuni Septi Nurhayati, *Peran Zakat Produktif Terhadap Pencapaian Sdgs Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baznas Kota Yogyakarta)*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta:Mizan, Pustaka Litera antar Nusa, 1999

Jurnal

- Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif, *Jurnal Al- Mashlahah* volume 1 nomor 1, 2013
- Almizan, Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2016
- Bambang Tejokusumo, Geoedukasi, *Jurnal Ekonomi*, Vol. III, No.1, Maret 2014.

Erwandari Nelti, Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 5, No. 3: 875-888, th.2017

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syaria;ah*, Vol. 7 No. 2, th. 2019

Helly Khairuddin, Erwin, “Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (Sdgs)”, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2018

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan, *Social network Jurnal*, Vol. 6 No. 2, th. 2017

Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn *Khattab*, Kendari: *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No. 2, Juli 2013

Sri Riwayatati dan Nurul Bidayatul Hidayah, Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah:103, *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Desember 2018

Tika Widiasuti, Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, *Jebis*, Vol. 1 No. 1, edisi Januari 2015

Wahyuningsih, Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Bisnis Manajemen*, Vol. 11 No. 3, th. 2017

Wawancara

Rizki Fitriansyah, wawancara dengan penulis, Kantor BAZNAS Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 30 Juni 2020

Mustahiq Baznas Kota Bandar Lampung, wawancara dengan peneliti, Bandar Lampung, 5 Juli 2020.

Sumber Online

<https://www.bps.go.id/istilah/index.html> (10 februari 2020)

Website BAZNAS di <https://baznas.go.id/asnaf> (10 Maret 2020).